

**Realisme Ofensif Mearsheimer dan Pancasila  
Bagi Kebijakan Indonesia dalam Menghadapi  
Pergolakan dan Ketidakpastian Global**

*Mearsheimer's Offensive Realism and Pancasila  
for Indonesia's Policy in Facing Global Turmoil al and Uncertainty*

oleh

**Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, M.Si**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

(Email: [yoga.pradana@staf.undana.ac.id](mailto:yoga.pradana@staf.undana.ac.id))

Dibawakan pada kegiatan *Fisip International Corner Talkshow*

pada tanggal 29 Mei 2023

**A. The Current Global Turmoil**

1. Polarisasi Militer:

a. Persaingan Kekuatan Besar (US led Nato, AUKUS, QUAD vs China, Russia, Iran, dan North Korea): Terjadi polarisasi antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China, yang bersaing untuk pengaruh regional dan kepentingan global. Meningkatnya rivalitas militer dan pengembangan teknologi canggih seperti senjata nuklir, sistem pertahanan rudal, dan kekuatan militer di luar angkasa menjadi fokus polarisasi ini.

- **NATO** adalah singkatan dari North Atlantic Treaty Organization atau dalam Bahasa Indonesia disebut juga dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara. NATO adalah sebuah organisasi aliansi militer antar banyak negara yang terdiri dari 2 negara di Amerika Utara, 27 negara Eropa dan 1 Negara Eurasia yang bertujuan untuk keamanan Bersama yang didirikan pada tahun 1949. Organisasi ini berdiri sebagai bentuk dukungan terhadap persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington, DC pada 4 April 1949. Tujuan dibentuknya NATO pada saat itu untuk menandingi tentara Soviet yang ditempatkan di Eropa Timur dan tengah. Anggota asli NATO terdiri dari 12 negara.
- **AUKUS**, juga ditulis **Aukus** ([/ˈɔːkəs/](#), [aw-kəs](#); sebuah akronim bahasa Inggris untuk tiga negara anggota: **A**ustralia, **U**nited **K**ingdom, **U**nited **S**tates), adalah

sebuah [pakta keamanan](#) trilateral antara [Australia](#), [Britania Raya](#), dan [Amerika Serikat](#) (AS) yang didirikan pada 15 September 2021.<sup>[1]</sup> Di bawah pakta tersebut, Amerika Serikat dan Britania Raya akan membantu Australia untuk mengembangkan dan mengerahkan [kapal-kapal selam bertenaga nuklir](#), selain mengerahkan militer Barat di kawasan Pasifik.<sup>[2]</sup> Meskipun pengumuman bersama oleh Perdana Menteri Australia [Scott Morrison](#), Perdana Menteri Britania Raya [Boris Johnson](#), dan Presiden Amerika Serikat [Joe Biden](#) tak menyebut nama negara lainnya, sumber-sumber anonim [Gedung Putih](#) menduga bahwa pakta tersebut dirancang untuk melawan pengaruh [Republik Rakyat Tiongkok](#) (RRT) di kawasan [Indo-Pasifik](#), sebuah karakterisasi yang disepakati oleh para analis. Sejumlah analis dan media juga mengkarakterisasi aliansi tersebut sebagai cara untuk melindungi [Republik Tiongkok](#) (Taiwan) dari ekspansionisme Tiongkok. Perjanjian tersebut mencakup bidang-bidang utama seperti [kecerdasan buatan](#), [perang dunia maya](#), kemampuan bawah air, dan kemampuan serangan jarak jauh. Ini juga mencakup komponen nuklir, mungkin terbatas pada Amerika Serikat dan Britania Raya, pada infrastruktur pertahanan nuklir.<sup>[3]</sup> Perjanjian tersebut akan fokus pada kemampuan militer, memisahkannya dari aliansi berbagi intelijen [Five Eyes](#) yang juga mencakup [Selandia Baru](#) dan [Kanada](#).

- **QUAD** (NATO versi Asia: AS, Jepang, Australia dan India). Quad sendiri merupakan aliansi yang sebelumnya digagas oleh Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe pada 2007. Beberapa pihak menilai bahwa aliansi ini didirikan untuk membendung pengaruh China di kawasan Asia Pasifik;
- **CSTO**. Organisasi Traktat Keamanan Kolektif ([bahasa Inggris](#): *Collective Security Treaty Organization*, CSTO; [bahasa Rusia](#): Организация Договора о коллективной безопасности, *Organizatsiya Dogovora o kollektivnoy bezopasnosti*, ODKB) adalah sebuah [aliansi militer antar-pemerintahan](#) yang ditandatangani pada 15 Mei 1992. Pada 1992, enam negara pasca-Soviet yang termasuk dalam [Persemakmuran Negara-negara Merdeka—Rusia, Armenia, Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, dan Uzbekistan—](#) menandatangani Traktat Keamanan Kolektif (juga disebut sebagai "Pakta Tashkent" atau "Traktat Tashkent").<sup>[4]</sup> Tiga negara pasca-Soviet lainnya—[Azerbaijan, Belarusia, dan Georgia](#)—menandatangani tahun berikutnya dan

perjanjian itu mulai berlaku pada tahun 1994. Lima tahun kemudian, enam dari sembilan negara—semuanya kecuali Azerbaijan, Georgia, dan Uzbekistan—sepakat untuk memperbarui perjanjian itu untuk lima tahun lagi, dan pada tahun 2002 enam negara itu setuju untuk membentuk Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif sebagai aliansi militer. Piagam CSTO menegaskan kembali keinginan semua negara anggota untuk menjauhkan diri dari penggunaan atau ancaman kekerasan. Penandatanganan ini menandakan negara anggota ini tidak akan dapat bergabung dengan aliansi militer lain atau kelompok negara lain,<sup>[2]</sup> sementara agresi terhadap suatu negara anggota akan dianggap sebagai agresi terhadap semua negara anggota.

- b. Konflik Regional: Persaingan militer di tingkat regional masih berlangsung, seperti konflik di **Suriah, Ukraina, dan Laut China Selatan**. Keterlibatan berbagai negara dengan berbagai kepentingan memperdalam polarisasi dalam hal dukungan terhadap pihak yang bertikai.
2. Polarisasi Ekonomi:
- a. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok juga mencerminkan situasi politik-ekonomi yang bergejolak. Kedua negara saling memberlakukan tarif dan pembatasan perdagangan, yang berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi global. Negara-negara lain di seluruh dunia terpaksa menyesuaikan kebijakan perdagangan mereka, menciptakan ketidakpastian dan ketegangan dalam hubungan internasional.
  - b. Munculnya **BRICS, Belt and Road Initiative (BRI) vs AS dan Uni Eropa**.
    - **Belt and Road Initiative (BRI):** China meluncurkan inisiatif BRI yang ambisius, yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas infrastruktur dan perdagangan dengan lebih dari 100 negara di Asia, Eropa, dan Afrika. Inisiatif ini menciptakan pengaruh ekonomi yang besar bagi China dan memunculkan polarisasi dengan negara-negara yang khawatir akan dominasi China dan implikasinya terhadap utang dan keamanan.
    - **Uni Eropa:** Pasar Tunggal dan Euro. Uni Eropa adalah entitas ekonomi terbesar di dunia, dengan pasar tunggal yang mengintegrasikan 27 negara anggota. Pemakaian mata uang Euro juga memberikan pengaruh ekonomi yang kuat. Keberadaan pasar tunggal dan kebijakan ekonomi yang terkoordinasi menciptakan polarisasi dengan negara-negara di luar Uni Eropa.

- **Eurasian economic cooperation.** Uni Ekonomi Eurasia (EAEU atau EEU) adalah serikat ekonomi beberapa negara pasca-Soviet yang berlokasi di Eurasia. Perjanjian Uni Ekonomi Eurasia ditandatangani pada 29 Mei 2014 oleh para pemimpin Belarus, Kazakhstan, dan Rusia, dan mulai berlaku pada 1 Januari 2015. Perjanjian yang bertujuan untuk akses Armenia dan Kyrgyzstan ke Uni Ekonomi Eurasia ditandatangani masing-masing pada tanggal 9 Oktober dan 23 Desember 2014. Perjanjian akses Armenia mulai berlaku pada 2 Januari 2015. Perjanjian akses Kyrgyzstan mulai berlaku pada 6 Agustus 2015. Kyrgyzstan berpartisipasi dalam EAEU sejak hari pendiriannya sebagai negara akses.

Uni Ekonomi Eurasia memiliki pasar tunggal terintegrasi dengan 183 juta orang dan produk domestik bruto lebih dari \$2,4 triliun.[4] EAEU mendorong pergerakan bebas barang dan jasa, dan menyediakan kebijakan bersama di bidang ekonomi makro, transportasi, industri dan pertanian, energi, perdagangan dan investasi luar negeri, bea cukai, regulasi teknis, persaingan, dan regulasi antimonopoli. Ketentuan untuk satu mata uang dan integrasi yang lebih besar diharapkan untuk masa depan.[10][11] Serikat beroperasi melalui lembaga supranasional dan antar pemerintah.[12] Dewan Ekonomi Eurasia Tertinggi adalah badan tertinggi Perhimpunan, yang terdiri dari Kepala Negara Anggota. Lembaga antar pemerintah tingkat kedua diwakili oleh Dewan Antar Pemerintah Eurasia (terdiri dari Kepala pemerintahan negara anggota). Pekerjaan sehari-hari EAEU dilakukan melalui Komisi Ekonomi Eurasia, badan eksekutif Perhimpunan. Ada juga badan yudisial – Pengadilan EAEU.[13]

- **BRICS** adalah kelompok negara yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, yang memiliki ekonomi yang sedang berkembang dengan potensi pertumbuhan yang tinggi. Polarisasi ekonomi antara BRICS dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat mencakup beberapa aspek: Pertumbuhan Ekonomi, Perdagangan dan Investasi dan Kekuatan Finansial. Khusus kekuatan finansial, BRICS telah berupaya untuk menguatkan posisi mereka dalam sistem keuangan global. Misalnya, mereka telah mendirikan Bank Pembangunan BRICS dan Dana Cadangan Kontingen BRICS sebagai alternatif terhadap lembaga-lembaga keuangan internasional yang sudah ada, seperti

IMF dan Bank Dunia. Ini mencerminkan polarisasi dalam hal kepemilikan dan kontrol terhadap sistem keuangan global.

## **B. Perspektif Realisme Ofensif Mearsheimer dalam hubungan internasional kontemporer**

Realisme ofensif merupakan sebuah teori yang diungkapkan oleh John Mearshimer. Teori ini mengatakan bahwa sistem internasional yang anarki memaksa negara untuk mendapatkan posisi yang paling tinggi dalam sistem internasional (Lobell, 2017). Mearshimer mengungkapkan bahwa negara akan terus berupaya untuk mencapai hegemoni karena itu adalah cara terbaik untuk memastikan kelangsungan hidup suatu negara dalam sistem internasional yang anarki.

Hegemoni merupakan sebuah kondisi dimana tidak ada lagi negara lain yang dapat mengimbangi kekuatan militer dari suatu negara sehingga dapat mendominasi negara-negara lain pada dunia internasional (Safranchuk et al., 2021). Mearshimer berpendapat bahwa dengan keadaan sistem internasional yang anarki dan penuh ketidakpastian akan motif dari negara lain, dan cara terbaik dari suatu negara untuk bertahan adalah memiliki sebanyak-banyaknya dan terus meningkatkan kapasitas militer yang dimiliki. Kapabilitas militer yang dimiliki suatu negara dapat menjadi faktor penentu dari keberlangsungan hidup suatu negara (Toft, 2005).

Keberlangsungan hidup suatu negara dianggap sebagai salah satu hal yang utama dalam menentukan perilaku negara terhadap suatu peristiwa maupun dalam pengambilan keputusan. Menurut Mearshimer teori ini didasarkan pada lima asumsi utama yang serupa dengan yang menjadi inti dari neorealisme defensif Kenneth Waltz, yaitu:

1. Kekuatan besar adalah aktor utama dalam politik dunia dan sistem internasional bersifat anarkis
2. Semua negara memiliki beberapa kemampuan militer ofensif
3. Negara tidak pernah bisa memastikan niat negara lain
4. Negara memiliki kelangsungan hidup sebagai tujuan utama mereka
5. Negara adalah aktor-aktor rasional, yang mampu menghasilkan strategi-strategi yang baik yang memaksimalkan prospek mereka untuk bertahan hidup

Pada akhirnya teori ini melihat sistem internasional sebagai suatu sistem anarkis, dimana setiap negara berusaha memaksimalkan pengaruh dan kekuasaan mereka hingga mencapai level hegemoni, karena hal inilah yang memastikan bahwa suatu negara bisa survive dan seluruh kepentingannya dapat terjamin. Terakhir, teori ini tidak membedakan antara negara

komunis atau liberalis. Semua negara memiliki motif yang sama untuk mengejar kepentingan mereka dan memperluas pengaruh kekuasaan mereka (Pashakhanlou, 2014).

### C. Intisari Pancasila

Pancasila sebagai ideologi dipandang oleh Bung Karno dan pendiri bangsa lainnya lebih memenuhi kebutuhan manusia dan lebih menyelamatkan manusia daripada *Declaration of Independence*-nya Amerika Serikat atau *Manifesto Komunis*. *Declaration of Independence* tidak mengandung Keadilan Sosial; adapun *Manifesto Komunis* tidak mengandung Ketuhanan Yang Maha Esa (“harus disublimir dengan Ketuhanan Yang Maha Esa”).<sup>2</sup> Oleh karena itu, Bung Karno menyebut Pancasila sebagai *hogere optrekking* (peningkatan) daripada *Declaration of Independence* dan *Manifesto Komunis*.

Secara historis kelima sila Pancasila merupakan perpaduan (sintesis) dari keragaman keyakinan, paham dan harapan yang berkembang di negeri ini. Sila pertama merupakan rumusan sintesis dari segala aliran agama dan kepercayaan. Sila kedua merupakan rumusan sintesis dari segala paham dan cita-cita sosial-kemanusiaan yang bersifat trans-nasional. Sila ketiga merupakan rumusan sintesis dari kebhinekaan (aspirasi-identitas) kesukuan ke dalam kesatuan bangsa. Sila keempat merupakan rumusan sintesis dari segala paham mengenai kedaulatan. Sila kelima merupakan rumusan sintesis daripada segala paham keadilan sosial-ekonomi.

Pilar ideologis dari kelima sila tersebut utamanya ditopang oleh “trilogi ideologi” arus utama: ideologi-ideologi berhaluan keagamaan; ideologi-ideologi berhaluan kebangsaan (nasionalisme); dan ideologi-ideologi berhaluan sosialisme. Ketiga haluan ideologis tersebut, meski memiliki titik perbedaan, menemukan titik temu dalam tiga prinsip dasar: sosio-religius, sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi.

1. Sosio-religius adalah prinsip religiositas yang bermurah hati (sosius); yang penuh welas asih dan lapang. Semangat ke-Tuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ke-Tuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain”. Prinsip ini terkandung pada sila pertama.
2. Sosio-nasionalisme adalah prinsip kebangsaan yang bermurah hati (sosius); penuh welas asih dan lapang; semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi perikemanusiaan kedalam dan keluar. “Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang

menyendiri, bukan *chauvinisme*.... Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia.” Prinsip ini merupakan perpaduan dari sila kedua dan ketiga.

3. Sosio-demokrasi adalah demokrasi yang bermurah hati (sosius); penuh welas asih dan lapang; demokrasi yang berorientasi keadilan sosial, yang tidak hanya menghendaki partisipasi dan emansipasi di bidang politik, tetapi juga partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi. ”Demokrasi sejati yang mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki. Sosio-demokrasi adalah demokrasi-politik dan demokrasi-ekonomi.” Prinsip ini merupakan perpaduan dari sila keempat dan kelima.

#### **D. Pancasila dan Arus Globalisasi yang Terpolarisasi dan Disharmoni**

”Globalisasi”, tulis Anthony Giddens (1990), ”adalah intersifikasi relasi-relasi sosial dunia yang menghubungkan lokalitas yang berjauhan sedemikian rupa sehingga peristiwa-peristiwa lokal dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di seberang jauh dan begitupun sebaliknya.”

Globalisasi merestrukturisasi cara hidup umat manusia secara mendalam, nyaris pada setiap aspek kehidupan. Berhembus dari Barat, dengan muatan pengaruh politik dan ekonomi Amerika Serikat yang kuat, globalisasi pada akhirnya menerpa semua bagian dunia, tak terkecuali Amerika Serikat sendiri, meskipun dengan konsekuensi yang tak merata.

Pada ranah negara-bangsa (*nation-state*) di satu sisi, globalisasi menarik (*pull away*) sebagian dari kedaulatan negara-bangsa dan komunitas lokal, tunduk pada arus *global interdependence*, yang membuat negara-bangsa dirasa terlalu kecil untuk bisa mengatasi (secara sendirian) tantangan-tantangan global. Dalam situasi kesalingtergantungan, tidak ada negara yang bisa mengisolasi dirinya. Kelemahan suatu elemen negara terhadap penetrasi kekuatan global ini bisa melumpuhkan dirinya. Bahkan negara adikuasa seperti Uni Soviet menjadi korban globalisasi yang didorong temuan-temuan teknologinya sendiri. Meski dalam kadar dan implikasi yang tak sama, krisis perekonomian sebagai konsekuensi globalisasi juga melanda Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya pada awal milenium baru.

Bagi Indonesia sendiri, globalisasi modern membawa politik nasional ke pusaran gelombang demokratisasi ketiga di dunia, yang menurut Huntington bermula pada 1974 dan menerpa Indonesia melalui gerakan reformasi pada akhir 1990-an. Gelombang demokratisasi ini melanda Indonesia ketika otoritas negara mendapatkan tekanan yang serius dari penetrasi kekuatan-kekuatan global, yang setelah perang dingin berakhir, terutama datang dari kekuatan “fundamentalisme pasar” dan “fundamentalisme agama”.

Di sisi lain, globalisasi juga menekan (*push down*) negara-bangsa, yang mendorong ledakan ke arah desentralisasi dan otonomisasi. Negara-bangsa menjadi dirasa terlalu besar untuk menyelesaikan renik-renik masalah di tingkat lokal, yang menyulut merebaknya etno-nasionalisme dan tuntutan otonomi lokal beriringan dengan revivalisme identitas-identitas kedaerahan. Dalam planet bumi yang dirasa kian "mengecil", jumlah negara bangsa justru kian bertambah. Antara 1960 dan 2006, anggota PBB bertambah hampir dua kali lipat dari 99 menjadi 192, dengan penambahan cepat terjadi menyusul kehancuran Blok-Timur (antara 1992-2006 terjadi penambahan sekitar 13 anggota baru). Seiring dengan itu, antara 1975 dan 2002, lebih dari 60 (asosiasi) kebangsaan diterima sebagai anggota baru Federation of International Football Association (FIFA). Bagi Indonesia sendiri, tekanan globalisasi yang bertaut dengan demokratisasi ini mendorong otonomisasi daerah dan pemekaran wilayah disertai kecenderungan "revivalisme etno-religius".

Pada ranah ekonomi, di satu sisi, pergerakan global dari ide-ide, orang, teknologi dan barang memberi peluang-peluang baru dalam perekonomian, terutama bagi negara-bangsa dan pelaku ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif. Perdagangan dunia saat ini jauh lebih luas cakupannya dan instan kecepatannya di banding periode mana pun dalam sejarah umat manusia. Yang paling menonjol adalah lonjakan dalam tingkat arus finansial dan kapital yang difasilitasi oleh perekonomian elektronik (*economy electronic*). Intensifikasi penguasaan ruang dan waktu lewat arus globalisasi berpengaruh besar bagi perilaku dunia usaha. Pergeseran modus produksi Fordisme (yang kaku dan kurang mobil) ke sistem akumulasi fleksibel (yang beroperasi dengan kelenturan dan layanan *just-in-time*) merupakan eksemplar bagaimana pengelolaan atas ruang dan waktu semakin signifikan dalam kapitalisme lanjut di era globalisasi ini.

Di sini lain, dengan posisi awal dan konsekuensinya yang tidak sama, globalisasi membelah dunia ke dalam pihak "yang menang" (*winners*) dan "yang kalah" (*losers*), serta menumbuhkan ketidaksetaraan baik secara internasional maupun dalam negara-bangsa (Hobsbawm, 2007: 3). Selain itu, kecenderungan negara-negara terbelakang untuk terjerat utang luar negeri, korupsi dan lemah dalam kontrol regulasi memudahkan penetrasi korporasi-korporasi internasional (dengan jejak rekam yang buruk dalam soal lingkungan) untuk merelokasi usahanya ke negara-negara tersebut. Akibatnya, globalisasi bukan saja menimbulkan "global village" (dusun dunia), tetapi juga "global pillage" (perampasan dunia).

Globalisasi dan perdagangan bebas juga mengandung kemungkinan gejala "penunggang bebasnya" (*free-riders*) tersendiri. Bahwa suatu organisme bisa melakukan tindakan di luar tujuan aslinya, bahkan melakukan sesuatu yang berkebalikan dari niat awalnya. Dalam konteks

kelembagaan antarbangsa, ada beberapa institusi yang semula didirikan dengan tujuan menolong, justru digunakan untuk tujuan sebaliknya. Hal inilah yang terjadi dengan IMF dan World Bank. Ketika didirikan, premis kebijakannya diletakkan pada pengandaian-pengandaian John Maynard Keynes. Tetapi kemudian IMF menjadi pintu bagi terjadinya globalisasi korporasi dan juga kegiatan spekulasi tingkat dunia, tanpa memperhatikan dampak tingkah lakunya.

Alhasil, globalisasi membawa ledakan pluralitas eksternal dan internal serta aneka bentuk kesenjangan sosial yang mempersulit perwujudan inklusi sosial. Tarikan global ke arah demokratisasi dan perlindungan hak-hak asasi memang menguat. Tetapi oposisi dan antagonisme terhadap kecenderungan ini juga terjadi. Di seluruh dunia, "politik identitas" (*identity politics*) yang mengukuhkan perbedaan identitas kolektif—etnis, ras, kelas dan status sosial, bahasa, agama, bahasa dan bangsa—mengalami gelombang pasang.

Karena setiap pencarian identitas memerlukan garis perbedaan dengan yang lain, maka politik identitas senantiasa merupakan politik penciptaan perbedaan. Apa yang harus diwaspadai dari kecenderungan ini bukanlah dialektika yang tak terhindarkan dari identitas/perbedaan, melainkan suatu kemungkinan munculnya keyakinan atavistik bahwa identitas hanya bisa dipertahankan dan diamankan dengan cara menghabisi perbedaan dan keberlainan (*otherness*).

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan persoalan tersebut, bangsa ini sesungguhnya telah memiliki daya antisipatifnya dalam ideologi Pancasila. Dalam mengantisipasi kemungkinan menguatnya fundamentalisme agama, sila pertama menekankan prinsip ketuhanan yang berkebudayaan dan berkeadaban. Seperti dinyatakan Bung Karno, "Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiadanya 'egoisme-agama'...Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain."

Dalam mengantisipasi dampak-dampak destruktif dari globalisasi dan lokalisasi, dalam bentuk homogenisasi dan partikularisasi identitas, prinsip "sosio-nasionalisme" yang tertuang dalam sila kedua dan ketiga Pancasila telah memberikan jawaban yang jitu. Dalam prinsip "sosio-nasionalisme", kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, berdiri atas prinsip semua untuk semua. Saat yang sama, kebangsaan Indonesia juga kebangsaan yang berperikemanusiaan, yang mengarah pada persaudaraan, keadilan dan keadaban dunia. Dikatakan Bung Karno, "Internasionalisme tidak

dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman-sarinya internasionalisme”.

#### **E. Saran Tiga ide utama:**

1. Kebijakan politik luar negeri Indonesia harus diarahkan pada upaya menjadi leading sector dalam membangun harmonisasi negara-negara di dunia dan menjadi pioneer dalam proses pembangunan keseimbangan dunia melalui pembentukan institusi politik dan ekonomi yang bisa mengcounter pengaruh US, NATO, EU, Rusia dan China, khususnya negara-negara di Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan dan Asia Tenggara
2. Pancasila harus menjadi pedoman kebijakan dan terinstitusionalisasi dalam perilaku harian atau habitasi warga negara Indonesia khususnya ketika berhadapan dengan isu kerukunan antar umat beragama. Hal ini penting, jika merujuk pada sejarah kehancuran Nusantara, yang mana selalu disebabkan oleh perang saudara karena perbedaan ideologi politik atau agama;
3. Kita harus mempercepat pembentukan identitas nasional dan mengurangi penguatan identitas primordial berbasis suku dan agama yang justru membawa kita kepada imajinasi kebangsaan yang berbasis tribe-nation
4. Kita harus meningkatkan kesadaran politik warga negara dan menjadikan fenomena persaingan global negara-negara besar menjadi isu utama dalam pemilu serentak tahun 2024 karena jika kita gagal, maka politisi yang terpilih dapat membawa Indonesia ke dalam keberpihakan pada salah satu kekuatan dunia yang sedang berkonflik, entah itu US, NATO, EU atau Rusia dan China. Hal ini penting, karena dalam Pemilu serentak khususnya pada level Pilpres, pastinya negara-negara besar yang sedang berkonflik akan berusaha meningkatkan pengaruh mereka pada Indonesia melalui investasi finansial pada salah satu atau seluruh calon presiden. Alhasil, presiden yang terpilih memiliki hutang politik yang harus dibayar melalui kebijakan negara, yang mana bisa saja tidak sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan juga mungkin saja menyeret Indonesia ke dalam pusaran konflik negara-negara besar dunia sehingga bisa berdampak negative bagi kehidupan politik, ekonomi, sosial dan agama masyarakat Indonesia.

## Referensi

- Latif, Yudi, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Latif, Yudi, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Mizan, Bandung, 2014
- Latif, Yudi, *Revolusi Pancasila*, Mizan, Bandung, 2015.
- Lobell, S. E. (2017). *Structural Realism/Offensive and Defensive Realism*. Oxford Research Encyclopedia of International Studies.
- Pashakhanlou, A. H. (2014). Waltz, Mearsheimer and the post-cold war world: The rise of America and the fall of structural realism. In *International Politics* (Vol. 51, Issue 3). <https://doi.org/10.1057/ip.2014.16>
- Safranchuk, I., Zhornist, V., & Nesmashnyi, A. (2021). Hegemony and World Order: An overview of the concept “Hegemony as Complexity.” *International Organisations Research Journal*, 16(1). <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2021-01-09>
- Toft, P. (2005). John J. Mearsheimer: An offensive realist between geopolitics and power. *Journal of International Relations and Development*, 8(4). <https://doi.org/10.1057/palgrave.jird.1800065>